

MEMBANGUN KERANGKA FILOSOFIS PENDIDIKAN YANG BERBASIS PADA PROBLEM SOSIAL

Sembodo Ardi Widodo

Universitas Islam Negeri
(UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta
drsembodo.widodo@uin-suka.ac.id

Abstract

This article is intended to provide philosophical insight of the importance of the educational concept based on social problems. Social problems like poverty, unemployment, moral deterioration, corruption, social violence, and others arise because there is malfunction of education or education institutions in Indonesia in solving those problems. Recently the developing character education must be accompanied by the spirit of progressivism and reconstructive education philosophy. In the west, both of the philosophical ideologies are designed to create progress and social integrity. Education curriculum is consciously directed to deal with the gap and the social life problem, both in relations between the community and the natural environment and the relationship between societies in politics, economic, and socio-cultural. If the concept of education in Indonesia is not built and directed to deal with social life in which taking part in solving the recent social problem widely, the education will only produce graduates who do not care for various social problems faced by the community and the country. Furthermore, the development of science, technology, and information in the globalization era not only give the advantage and efficiency but also have a negative impact on people's behavior individually or in groups, and all of them must be anticipated and coped by education.

Keyword: philosophical framework, education, social problem

Pendahuluan

Pendidikan merupakan lembaga yang dengan sengaja diselenggarakan untuk mewariskan dan mengembangkan pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan keahlian oleh generasi yang lebih tua kepada generasi berikutnya. Melalui pendidikan sebagian besar manusia berusaha memperbaiki tingkat kehidupan mereka. Terjadi hubungan yang kuat antara tingkat pendidikan seseorang dengan tingkat sosial kehidupannya. Jika pendidikan seseorang maju, tentu maju pula kehidupannya, demikian pula sebaliknya.¹ Karena fungsi pendidikan ialah membantu melahirkan pribadi-pribadi unggul dan kreatif serta inovatif untuk dapat membawa masyarakatnya kepada keadaan yang lebih baik.²

¹ Sutrisno, *Pendidikan Islam yang Menghidupkan: Studi Kritis Terhadap Pemikiran Pendidikan Fazlur Rahman*, (Yogyakarta: Kota Kembang, 2006), h. 51.

² H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2012), h. 19.

Di samping itu, pendidikan juga merupakan upaya yang dapat mempercepat pengembangan potensi manusia untuk mampu mengemban tugas yang dibebankan kepadanya, karena hanya manusia yang dapat dididik dan mendidik. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan fisik, mental, emosional, moral, serta keimanan dan ketaqwaan manusia.³

Pendidikan adalah kunci utama pembangunan nasional, sebab pembangunan nasional menitik beratkan pada pembangunan sumber daya manusia sebagai investasi jangka panjang. Dalam perkembangan sekarang ini, pendidikan tidak hanya bersangkut paut pada intelektualitas peserta didik, namun juga moralitas, dan lebih jauh lagi pendidikan menawarkan pemecahan persoalan sosial yang kerap memunculkan konflik dalam sekelompok masyarakat. Konflik adalah sebagian dari penghambat pembangunan nasional, di samping pembangunan bidang lainnya, yaitu ekonomi, politik, dan budaya. Maka pendidikan turut berperan dalam penuntasan masalah kemiskinan, masalah pengangguran, masalah kemerosotan moral, masalah korupsi, dan lain sebagainya.

Kerangka Dasar Filosofis Pendidikan Berbasis Problem Sosial

Pendidikan mempunyai peran kreatif-konstruktif dalam pembentukan masyarakat. Secara implisit ide ini telah terekspresikan dalam keyakinan publik di mana pendidikan itu memiliki kekuatan konstruktif dalam hubungannya dengan problem-problem sosial budaya. Pendidikan menjadi suatu proses sosial, alat yang sangat efektif dan utama dalam rekonstruksi sosial, yaitu mengatasi problem-problem sosial kemasyarakatan agar menuju ke arah tatanan dan kehidupan sosial yang lebih baik dan maju.

Munculnya pandangan filosofis pendidikan seperti ini berakar dari ide dan karya-karya nyata John Dewey khususnya, dan para pengikutnya secara umum. Tesis utamanya adalah bahwa sekolah itu bukanlah melulu institusi residual untuk mempertahankan sesuatu sebagaimana adanya. Tetapi pendidikan mempunyai fungsi kreatif dalam pembentukan individu, dan pada gilirannya pembentukan budaya. Ini berarti dalam fungsi pendidikan dan persekolahan itu ada kesatuan antara terma psikologis dan sosial. Pengetahuan tentang kondisi-kondisi sosial pada situasi peradaban sekarang adalah penting agar sekolah atau pendidik dapat, sebagaimana mestinya, menginterpretasikan kekuatan-kekuatan transformatif pendidikan, dan pada dasarnya sekolah itu terutama sekali merupakan institusi sosial.⁴

Konsep tentang demokrasi pendidikan, menurut Dewey merupakan wujud dari masyarakat yang maju secara intensional, ditegakkan untuk perubahan, dan terorganisir secara rasional dan seilmiah mungkin. Peran pendidikan dalam

³ Udin Syaefudin Sa'ud dan Abin Syamsudidin Makmun, *Perencanaan Pendidikan: Suatu Pendekatan Komprehensif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005), h. 6.

⁴ Lihat, John Dewey, *My Pedagogic Creed*, (New York: Progressive Education Association, 1929), h. 3-6.

masyarakat seperti ini adalah untuk menanamkan kebiasaan-kebiasaan yang memungkinkan bagi individu-individu untuk mengontrol lingkungannya dari pada melulu tunduk kepada lingkungannya. Masyarakat yang maju akan berusaha membentuk pengalaman generasi muda sedemikian rupa ke arah yang lebih baik dari pada sekedar mereproduksi kebiasaan-kebiasaan sekarang, sehingga masyarakat dewasa masa depan dapat menjadi lebih baik baginya. Kehandalan potensi pendidikan sebagai agen konstruktif perbaikan masyarakat ini menjadi suatu kenyataan, suatu realita yang tidak hanya sekedar mengembangkan anak dan pemuda, namun juga masyarakat masa depan di mana mereka akan menjadi unsur utama.⁵

Elaborasi-elaborasi fungsi sosial sekolah berikutnya adalah melakukan berbagai pembentukan yang tentunya berbeda seiring dengan terus berubahnya masyarakat dengan merubah individu-individu untuk melakukan rekonstruksi sistem sosial yang sudah direncanakan. Beberapa elaborasi itu terutama menekankan pertanggungjawaban sekolah dalam menghadapi tuntutan-tuntutan sosial sekarang. Interpretasi yang mendalam dari pertanggungjawaban ini mencakup pembentukan program sekolah yang sesuai dengan perspektif jangka panjang realitas-realitas masyarakat yang berubah, dan juga program itu harus menyajikan studi-studi yang memadai untuk seluruh rangkaian kebutuhan-kebutuhan sosial.

Sementara kalangan melihat fungsi sosial pendidikan sebagai salah satu promosi orientasi kritik terhadap situasi sekarang. Penerjemahan dari pandangan ini menyebabkan penekanan atas *problem solving* dalam ilmu-ilmu sosial, dan memperkenalkan materi atau studi-studi yang berbasis pada problem, termasuk pemahaman akan kekuatan-kekuatan sosial yang menyebabkan krisis sosial.⁶

Walaupun demikian, apapun variasi dari konsep-konsep tentang fungsi sosial pendidikan, ada ide-ide fundamental tertentu yang berada di semua kawasan konsep-konsep tersebut. *Pertama* adalah pemahaman bahwa pendidikan itu biasanya bekerja dalam setting budaya masyarakat tertentu, pada waktu tertentu, di tempat tertentu, dan membentuk individu dalam berbagai ukuran untuk berpartisipasi aktif dalam masyarakat itu. Semua keputusan mengenai pendidikan, termasuk mengenai kurikulum, dibuat dalam konteks masyarakat. Nilai-nilai dan kekuatan-kekuatan dari masyarakat itu menentukan tidak hanya perangai manusia apa yang eksis, tetapi juga untuk perluasan perangai manusia apa yang dibutuhkan selanjutnya. Para pengambil kebijakan pendidikan itu sendiri terbenam dalam budaya itu, dan karenanya "tunduk" kepada konsepsi-konsepsi yang telah terkondisikan secara kultural bagaimana pendidikan harus melayani masyarakat.

⁵ Lihat, John Dewey, *Democracy and Education*, (New York: Macmillan, 1928), h.92.

⁶ Brubacher, *Modern Philosophies of Education*, (McGraw-Hill, 1950), h. 186-201.

Konsep ini berarti bahwa tidak hanya pelatihan intelektual saja yang harus diarahkan untuk memahami kekuatan-kekuatan budaya dan menguasai peralatan intelektual yang diperlukan untuk pemahaman tersebut, tetapi juga bahwa di sana ada pertanggungjawaban yang fundamental terhadap nilai-nilai esensial dan loyalitas-loyalitas budaya.

Ide fundamental *kedua* dari konsep ini adalah apresiasi yang mendalam terhadap fakta perubahan dalam budaya modern dan makna dari perubahan sosial itu. Jika masyarakat dan budaya berubah, maka itulah tugas dari sekolah-sekolah untuk memainkan peran konstruktif dalam perubahan itu. Pendidikan harus menyesuaikan tujuan dan program-programnya dengan kondisi-kondisi yang berubah ini, dan jika mungkin memberikan ramalan-ramalan situasi budaya dan masyarakat masa depan, khususnya kondisi-kondisi dari perubahan yang cepat yang dihasilkan oleh teknologi modern. Sebaliknya, pendidikan menjadi tidak nyata, hampa dan tidak berdayaguna karena ia tidak dapat menyiapkan generasi muda kepada pertanggungjawaban sosial budaya yang selalu dinamis, dan dapat mengantisipasi problem-problem kehidupan kontemporer.

Untuk menghadapi kondisi yang selalu berubah, berarti bahwa tujuan dan program-program pendidikan itu harus direncanakan untuk mengimplementasikan tujuan-tujuan tersebut, termasuk orientasi yang berhubungan dengan penggunaan material-material harus dirubah juga. Inilah pentingnya menggunakan inteligensi kritis dan sikap-sikap ilmiah dalam memahami dan memecahkan problem-problem sosial dan kemanusiaan. Kualitas-kualitas ini dapat digali untuk perluasan kurikulum, yaitu bahwa materi pelajaran dalam pendidikan akan berarti bagi pengalaman dan perhatian-perhatian budaya yang sedang berjalan, dan pengalaman itu digunakan sebagai kunci untuk memaknai pengetahuan dan untuk menerjemahkan materi pelajaran ke dalam perilaku dan tindakan.

Ide fundamental *ketiga* adalah bahwa pendidikan itu merupakan perbuatan moral. Ia dimulai dan berakhir dengan keputusan-keputusan nilai. Keputusan-keputusan pendidikan, apakah berkenaan dengan seleksi-seleksi tujuan dan kurikulum selalu mencakup keputusan-keputusan nilai. Karena alasan ini, pendidikan akan selalu mencakup elemen preskripsi. Walaupun penelitian ilmiah akan mengungkapkan apa adanya, namun ia tidak akan memutuskan apa yang harus ada. Dalam kerangka pikir ini, pendidikan menjadi semacam perusahaan moral, yang di dalamnya ia menyeleksi bagian-bagian apa dari budaya, kebijakan apa, nilai-nilai yang bagaimana, dan ideal-ideal apa yang hendak ditransmisikan. Namun demikian, perlu dicatat bahwa tidak ada sekolah di masyarakat manapun yang dapat bersikap netral sepenuhnya. Perbedaan-perbedaan kebijakan akan selalu ada, dan perbedaan itu terletak pada apakah

dasar seleksi-seleksi itu dibuat jelas dan apakah seleksi itu dibuat dengan beberapa tingkatan metode dan penelitian ilmiah yang rasional.⁷

Sekelompok pendidik yang baru-baru ini menamakan dirinya sebagai “rekonstruksionist”, dalam nada yang sama dan dengan *sense of urgency* yang sama menegaskan pentingnya misi sosial pendidikan. Tesis utama mereka adalah bahwa transformasi masyarakat melalui revolusi teknologi dan sains berjalan secara radikal sebagaimana untuk memperoleh konsensus moral dan intelektual baru guna membentuk dan mengarahkan transformasi itu. Adalah tugas para pendidik untuk menganalisis trend-trend sosial, melihat problem-problem yang dihadapi masyarakat, berspekulasi tentang segala akibat yang ditimbulkan oleh dinamika sosial dewasa ini, dan memproyeksikan nilai-nilai dan tujuan-tujuan yang perlu ditampakkan untuk mempertahankan cara hidup yang demokratis.

Pendidikan dan Problem Sosial

1. Pendidikan dan Masalah Kemiskinan

Krisis multidimensional yang terjadi pada tahun 1997 menyebabkan jumlah penduduk miskin di Indonesia semakin bertambah. Mengutip data pusat statistik, jumlah penduduk miskin di Indonesia pada bulan Maret 2006 sebesar 39,05 juta (17,75%). Dibandingkan dengan penduduk miskin pada Februari 2005 yang berjumlah 35,10 juta (15,97), maka jumlah penduduk miskin meningkat sebesar 3,95 juta. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya angka pengangguran, sementara harga barang-barang di pasaran terus meningkat. Krisis ekonomi yang berkepanjangan berpengaruh pada perekonomian negara sehingga pemerintah mengambil kebijaksanaan, seperti menaikkan harga BBM. Bagi penduduk miskin pemerintah memberikan dana kompensasi BBM, namun masih saja ada kesalahan teknis sehingga dana kompensasi tersebut tidak sampai pada sasaran.

Beberapa akibat yang timbul dari meningkatnya angka kemiskinan antara lain:

- a. Penurunan tingkat kesehatan masyarakat akibat kekurangan gizi, contohnya kasus busung lapar di beberapa daerah yang akhir-akhir ini semakin meningkat; dan
- b. Munculnya demoralisasi yang ditandai dengan meningkatnya angka kriminalitas.⁸

Apabila suatu masyarakat dan bangsa yang hanya dapat bertindak secara tradisional di dalam kehidupan ekonominya, mereka tidak dapat bersaing di dalam kehidupan global. Pendidikan dalam abad 21 mempunyai

⁷ Penjelasan lebih lanjut tentang ketiga ide fundamental tersebut bisa dilihat, Hilda Taba, *Curriculum Development: Theory and Practice*, (New York: Harcourt, Brace & World, Inc., 1962), h. 25-26.

⁸ Lihat, Tim Sosiologi, *Sosiologi 1: Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*, (Jakarta: Yudhistira, cet. 2, 2007), h. 18-19.

tanggung jawab moral untuk menunjang perkembangan ekonomi yang berdasarkan ilmu pengetahuan agar supaya dapat membantu masyarakat membangun suatu kehidupan yang lebih adil dan lebih makmur serta kompetitif.

Pengentasan kemiskinan hendaknya datang dari masyarakat sendiri untuk mengatasi keterpurukannya, tentunya dengan bantuan pemerintah. Indonesia sebagai salah satu negara berkembang dengan jumlah penduduk yang besar, nomor lima di dunia, yang masih hidup di bawah garis kemiskinan absolut yaitu penduduk yang hidup kurang dari US\$ 1 sehari masih sangat besar sebagaimana yang terlihat dalam tabel berikut ini. Dalam masa krisis, jumlah penduduk Indonesia miskin semakin bertambah.⁹

Negara	Jumlah Penduduk	Jumlah Penduduk Miskin
India	1.000 juta	525 juta
Cina	1.300 juta	353 juta
Bangladesh	130 juta	36,4 juta
NIGERIA	110,6 juta	31,8 juta
Brazil	166 juta	30,9 juta
Indonesia	209 juta	30,7 juta

2. Pendidikan dan Masalah Pengangguran

Pada bulan Juni 2015, Indopos mengabarkan bahwa persoalan pengangguran di Indonesia masih menjadi momok menakutkan. Pasalnya, tingkat pengangguran di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat, dalam kurun waktu satu tahun, tingkat pengangguran di Indonesia mengalami penambahan sebanyak 300 ribu jiwa. Bahkan, dalam Februari 2015 saja sudah mengalami peningkatan dibandingkan dengan Agustus 2014, sebanyak 210 ribu jiwa. Sementara, jika dibandingkan dengan Februari tahun lalu bertambah 300 ribu jiwa. BPS mencatat, ada 7,4 juta pengangguran terbuka per Februari 2015. Ironisnya, kenaikan tersebut sebagian disebabkan sarjana yang menganggur. Kondisi ini mengkhawatirkan. Apalagi, akhir tahun ini, Indonesia akan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA). Ini artinya, SDM Indonesia tidak hanya bersaing dengan sesama anak bangsa saja, tapi juga dengan bangsa lain. Perguruan Tinggi (PT), termasuk universitas sebagai pencetak calon tenaga kerja mendapatkan tantangan untuk melahirkan SDM berstandar kompetensi global.

Menteri Ketenagakerjaan M. Hanif Dhakiri mengatakan bahwa menurutnya salah satu faktor timbulnya pengangguran adalah tidak terserapnya lulusan pendidikan oleh dunia industri, karena tidak memiliki kompetensi dan kualifikasi yang dibutuhkan pasar kerja. Maka itu, dia

⁹ Lihat, H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan Nasional*, (Jakarta, Rineka Cipta, Cet. 2, 2009), h. 47.

sangat mendorong dan memberikan perhatian khusus terhadap pengembangan SDM berbasis kompetensi untuk menjawab tantangan MEA. Sebab dengan ketersediaan SDM yang berkompeten dan berdaya saing tinggi, tenaga kerja Indonesia diyakini tidak akan kalah bersaing dengan pekerja yang berasal dari negara-negara ASEAN lainnya.¹⁰

Dengan pendidikan yang dibarengi dengan kemampuan *life skill* yang tinggi, maka pengangguran di Indonesia dapat teratasi sedikit demi sedikit menjadi lebih baik.

3. Pendidikan dan Masalah Kemerosotan Moral

Indonesia dewasa ini tengah mengalami “badai” arus demoralisasi sekaligus dehumanisasi yang begitu luar biasa. Berbagai kasus seperti perkelahian antar pelajar, pelecehan seksual, pemerkosaan, pembunuhan, pornografi maupun penggunaan berbagai obat-obatan terlarang (narkotika) dengan pelaku anak usia remaja dan dewasa semakin meningkat, bahkan terkesan tanpa kendali. Tercatat misalnya pada tahun 2008 lalu saja, hampir setiap bulannya, terjadi rata-rata 204 kasus pemerkosaan dan pelecehan seksual, 137 kasus penggunaan narkotika, serta tidak kurang dari 5-10 kali perkelahian antar pelajar maupun mahasiswa di Indonesia.¹¹

Di era globalisasi yang berada dalam dunia yang terbuka ini, ikatan nilai-nilai moral mulai melemah. Masyarakat mengalami multikrisis yang dimensional, dan krisis yang dirasakan sangat parah adalah krisis nilai-nilai moral. Perceraian menjadi sesuatu yang biasa, penelantaran anak dimana-mana, kenakalan remaja, perkelahian, tawuran di kalangan anak-anak SMA, perkelahian di kalangan mahasiswa bahkan telah merembet menjadi tawuran antar kampung, bahkan tak jarang kita lihat tawuran antar supporter sepak bola di Indonesia yang sudah tak terkendalikan lagi. Yang baru-baru ini terjadi adalah tawuran antar supporter sepak bola saat perebutan Piala Presiden beberapa waktu lalu.

Hal ini baru merupakan sebagian, dari perilaku menyimpang di kalangan remaja, pemuda, serta masyarakat yang sedang sakit, yang menurut hasil penelitian merupakan akibat dari disintegrasi keluarga seperti *poor-parenting*. Para generasi muda telah kehilangan pegangan dan keteladanan dalam meniru perilaku yang etis. Mereka kehilangan model orang dewasa yang dapat digugu dan ditiru. Gejala kehidupan pemimpin masyarakat yang diistilahkan di dalam gaya hidup KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme) menunjukkan bahwa masyarakat itu sendiri juga telah kehilangan pegangan nilai-nilai moralnya.

Pada dasarnya tingkat kesadaran masyarakat sudah cukup tinggi untuk menanggulangi kemerosotan moral dan budi pekerti anak. Para

¹⁰ Baca lebih jelasnya, Indopos.co.id pada hari Senin, 8 Juni 2015.

¹¹ Jawa Pos, 21 Oktober 2009.

orang tua pada umumnya berlomba-lomba menanamkan nilai-nilai moral dan budi pekerti luhur melalui pendidikan agama sejak usia dini. Penanaman pendidikan agama sejak usia dini akan secara otomatis tertanam nilai-nilai moral dan budi pekerti luhur yang akan berdampak sangat positif bagi perkembangan jiwa anak hingga dewasa. Hal ini terjadi disebabkan moral dan budi pekerti merupakan bagian dari pendidikan agama yang disebut juga sebagai pendidikan akhlak.¹²

Meningkatnya peran-peran masyarakat dalam kehidupan bermasyarakat, termasuk dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, harus pula disertai dengan kepemimpinan dalam masyarakat yang bersih dan terbuka. Pengalaman kita masa lalu, dengan gagalnya program indroktinasi melalui P-4¹³ menunjukkan, betapa pentingnya peranan pemimpin masyarakat di dalam mewujudkan nilai-nilai budaya yang ingin kita wujudkan. Oleh sebab itu, Undang-Undang Republik Indonesia No. 28 Tahun 1999 tentang penyelenggaraan Negara yang bersih dan bebas dari KKN, merupakan langkah awal dalam mewujudkan cita-cita luhur tersebut. Stigma mengenai moral pemimpin-pemimpin masa lalu yang hanya mementingkan dirinya sendiri telah menyebabkan hilangnya pusat-pusat panutan nilai dari masyarakat. Legitimasi pemimpin dewasa ini telah merosot bahkan hilang sama sekali. Oleh sebab itu, upaya kita untuk melahirkan pemerintah yang bersih dari KKN, merupakan langkah awal yang sangat strategis dalam pola pendidikan yang efektif.¹⁴

Berbagai usulan tentang perlunya pendidikan budi pekerti dalam pembangunan dan pembentukan moralitas dan mentalitas bangsa, bukanlah sesuatu yang baru. Bahkan menurut Azyumardi Azra (2000), sebelum pelajaran agama menjadi mata pelajaran wajib, dalam rencana pelajaran pada tahun 1947, yang ada hanyalah mata pelajaran “didikan budi pekerti” yang bersumber dari nilai-nilai tradisional, khususnya yang terdapat dalam cerita pewayangan. Sejak 1950 (UU No. 4/1950 dan UU No. 12/1954 tentang Dasar-Dasar Pendidikan), pendidikan agama masuk sebagai mata pelajaran fakultatif. Artinya, ia merupakan mata pelajaran *optional* (pilihan), yang boleh diambil atau tidak diambil oleh peserta didik, apakah atas anjuran orang tuanya atau atas keputusannya sendiri. Hal yang sama juga ditetapkan dalam Tap. MPRS No. II/1960 dan Tap. MPRS No. XXVII/1966 dengan penegasan bahwa pendidikan agama diselenggarakan sejak dari SD sampai perguruan tinggi. Dengan demikian, maka pendidikan dapat mengatasi masalah kemerosotan moral masyarakat.

4. Pendidikan dan Masalah Korupsi dan Lainnya

¹² Sam M. Chan dan T. Sam Tuti, *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, (Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005), h. 28.

¹³ P-4 singkatan dari Pendidikan Penghayatan dan Pengamalan Pancasila.

¹⁴ Lihat, H.A.R. Tilaar, *Perubahan Sosial dan ...*, h. 415-416.

Dalam "Tajuk Rencana" harian *Kompas* tanggal 10 Februari 2003, dikemukakan suatu kekhawatiran atas krisis masyarakat yang disebabkan oleh merajalelanya korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang bukannya semakin menghilang dari masyarakat kita bahkan semakin lebih merajalela dalam era reformasi. "Tajuk Rencana" tersebut melihat bahwa KKN telah menjadi budaya masyarakat kita.¹⁵ Dari manakah kita akan mulai memberantas penyakit masyarakat yang sangat berbahaya ini? Ternyata pemberantasan KKN harus dimulai dari diri kita sendiri, yaitu dengan memperbarui kesadaran moral kita. Kebangkitan moral tersebut harus kita mulai dari keluarga, sekolah, dan masyarakat sekitar kita. Masalah panutan dari pemimpin-pemimpin kita yang kehilangan nilai-nilai kepemimpinan, seperti asketisme serta para anggota masyarakat yang kehilangan kesadaran moral disebabkan antara lain oleh isi pendidikan kita yang bersifat intelektualistik. Kita bisa lihat pejabat-pejabat kita yang korupsi, ternyata kebanyakan dari mereka adalah para lulusan perguruan tinggi. Oleh sebab itu, krisis moral tersebut merupakan masalah pendidikan.

Di Harian *Kompas* lagi juga memberitakan bahwa berdasarkan indeks persepsi korupsi, yang dilaksanakan oleh lembaga survei Transparency International, Indonesia masih masuk jajaran negara-negara terkorup dengan menempati peringkat ke-118 dari 174 negara.¹⁶

Secara faktual, data realistik menunjukkan bahwa moralitas maupun karakter bangsa (Indonesia) saat ini telah runtuh. Runtuhnya moralitas dan karakter bangsa tersebut telah mengundang berbagai musibah dan bencana di negeri ini. Musibah dan bencana tersebut meluas pada ranah sosial-keagamaan, hukum, maupun politik.

Musibah sosial keagamaan dapat diamati pada hilangnya etika kemanusiaan, sehingga penghormatan terhadap jabatan dianggap lebih penting dari pada menghormati pribadi sebagai manusia, goncangan hukum dan politik dapat diamati pada kasus korupsi yang terjadi di setiap meja instansi, praktik money politik, skandal kasus Bank Century dan sebagainya; gelombang krisis ekonomi dapat diamati pada paradok negeri ini, di mana terdapat kekayaan sumber daya alam yang luar biasa, namun rakyatnya tetap miskin dan sengsara; "letusan gunung" spiritualitas dapat diamati pada fenomena bom bunuh diri, meluasnya isu terorisme, radikalisme, fundamentalisme, pembakaran gereja, bahkan pembakaran masjid Ahmadiyah serta pembakaran masjid Syi'ah di Jawa Timur dan sebagainya; huru-hara hukum dan peradilan dapat dilihat pada makelar kasus Gayus Tambunan, "cicak versus buaya", PNS muda kaya raya, kasus "sandal jepit", dan sebagainya; "banjir bandang" menerjang dunia pendidikan berupa

¹⁵ Harian *Kompas*, 10 Februari 2003, "Tajuk Rencana".

¹⁶ *Kompas*, 2012

tawuran pelajar antar sekolah, kecurangan ketika ujian, penyalahgunaan narkoba, pergaulan bebas dan sebagainya.

Lengkap sudah bencana hukum maupun politik, gempa sosial, dekadensi moral keagamaan, krisis etika, goncangan spiritual, merosotnya kepercayaan diri, dan sebagainya. Semuanya datang silih berganti mendera bangsa ini bertubi-tubi dan cenderung semakin menjadi-jadi.¹⁷

Di samping itu, krisis karakter di Indonesia tercermin dalam banyak fenomena sosial ekonomi yang secara umum dampaknya menurunkan kualitas kehidupan masyarakat luas, termasuk rusaknya lingkungan hidup. Korupsi, mentalitas peminta-minta, konflik horizontal dengan kekerasan, suka mencari kambing hitam, kesenangan merusak diri sendiri (mengkonsumsi narkoba), dan lain-lain adalah beberapa ciri masyarakat yang mengalami krisis karakter.

Korupsi adalah salah satu bentuk krisis karakter yang dampaknya sangat buruk bagi bangsa (Indonesia). Ia menjadi penghambat utama kemajuan ekonomi bangsa, dan pada gilirannya menjadi sumber dari berkembangnya kemiskinan di Indonesia. Dalam pergaulan internasional, posisi Indonesia sebagai salah satu negara yang korupsinya berada di rangking atas (satu sampai dengan lima besar) sehingga bangsa ini kehilangan martabatnya di tengah-tengah pergaulan dengan bangsa lain. Korupsi terjadi karena orang-orang kehilangan beberapa karakter baik, terutama sekali kejujuran, pengendalian diri, dan tanggung jawab sosial.¹⁸

Di samping korupsi, memudarnya karakter ditunjukkan oleh meningkatnya kesenangan dari sebagian warganya. Secara individu banyak orang mengonsumsi narkoba, secara sosial, banyak orang terlibat dalam aksi-aksi yang berdampak merusak atau menghancurkan diri. Ketika bangsa-bangsa lain meningkatkan daya saing negaranya, kita di Indonesia, sebagian dari kita malah dengan bersemangat memakai energi masyarakat untuk mencabik-cabik dirinya sendiri, dan sebagian besar yang lain membiarkannya. Memecahkan perbedaan pendapat atau pandangan dengan menggunakan kekerasan, secara sistematis mengobarkan kebencian untuk memicu konflik horizontal atas dasar SARA, dan menteror bangsa sendiri. Hal ini terjadi karena makin memudarnya nilai-nilai kemanusiaan yang mencakup semangat dan kesediaan untuk bertumbuh kembang bersama secara damai dalam kebhinekaan.

Seperti kita ketahui bahwa masyarakat Indonesia adalah masyarakat yang sangat rajin melakukan kegiatan keagamaan. Sungguh sebuah keganjilan terjadi, bahwa masyarakat yang merasa religius, namun

¹⁷ Suyadi, Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h. 1-2.

¹⁸ Gede Raka dalam Djoko Dwiyanto dan Ign. Gatut Saksono, Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila (Negara Pancasila: Agama atau Sekuler; sosialis atau Kapitalis, (Yogyakarta: Ampera Utama, 2012), h. 38-39.

negaranya penuh korupsi. Lebih memprihatinkan lagi adalah bahwa menurut salah seorang pejabat KPK, lembaga negara yang paling korup adalah Departemen Negara (Pikiran Rakyat 18 Oktober 2006). Apabila pernyataan tersebut didasarkan pada data yang dapat dipercaya, maka hal ini adalah contoh yang paling nyata dari hipokrisi di Indonesia. Hipokrisi atau kemunafikan mengandung arti kepura-puraan atau menyuruh atau menasihati orang lain melakukan hal yang baik namun dia sendiri melakukan hal sebaliknya.¹⁹

Sebagai alternatif yang bersifat preventif, pendidikan diharapkan dapat mengembangkan kualitas generasi muda bangsa dalam berbagai aspek yang dapat memperkecil dan mengurangi penyebab berbagai masalah budaya dan karakter bangsa. Upaya mengatasi kondisi tersebut maka diperlukan pemahaman dan langkah untuk membangun kembali karakter bangsa sesuai nilai-nilai Pancasila.

Urgensi Pendidikan Sebagai Solusi Pemecahan Problem Sosial

Secara filosofis pendidikan merupakan hak asasi manusia. Sejalan dengan UUD 1945, sesungguhnya pendidikan bersifat terbuka, demokratis, tidak diskriminatif, dan menjangkau semua warga negara tanpa kecuali.²⁰ Pendidikan itu sangat penting sekali buat kehidupan manusia. Apalagi kita hidup di Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ini yang serba pluralis. Tanpa pendidikan, bagaimana jadinya bangsa Indonesia ini ke depan? Pendidikan dapat diperoleh dengan cara belajar. Proses belajar dapat terjadi kapan saja dan di mana saja terlepas dari ada yang mengajar atau tidak. Proses belajar terjadi karena adanya interaksi individu dengan lingkungannya. Belajar adalah suatu proses yang kompleks yang terjadi pada semua orang dan berlangsung seumur hidup, sejak dia masih bayi hingga ke liang lahat nanti.²¹

Kehidupan suatu bangsa juga ditentukan oleh tingkat pendidikannya. Suatu bangsa yang pendidikannya maju, tentu kehidupannya juga maju, demikian pula sebaliknya. Misalnya, Malaysia tingkat pendidikannya maju, tentu kehidupannya maju pula. Bangsa Indonesia tingkat pendidikannya kurang maju, tentu kehidupannya juga kurang maju. Malaysia dikatakan lebih maju dari Indonesia, karena Malaysia lebih maju pendidikannya dari Indonesia.

Pada umumnya bangsa yang tingkat pendidikannya maju, maju pula perkembangan sains dan teknologinya. Jepang pendidikannya maju, tentu sains dan teknologinya juga maju, seperti dalam bidang teknologi otomatis dan elektronik. Amerika maju pendidikannya, juga maju dalam bidang teknologi eksplorasi tambang. Sekalipun Amerika tidak lebih banyak memiliki tambang

¹⁹ Ibid., h. 39-40.

²⁰ Munawir Yusuf, dkk, *Pendidikan Bagi Anak dengan Problema Belajar*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003), h. 3.

²¹ Arif S. Sadiman, dkk, *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), h. 1.

minyak dari Saudi Arabia, tetapi Amerika lebih banyak menguasai minyak, karena canggih di bidang explorasi tambang minyak.

Biasanya bangsa yang tingkat pendidikannya tinggi, pandai mengatasi masalah yang mereka hadapi. Sebaliknya, bangsa yang tingkat pendidikannya rendah, tentu sulit mengatasi masalah yang mereka hadapi. Amerika pandai mengatasi masalah bahan bakar minyak (BBM), sekalipun tidak banyak memiliki tambang minyak, karena tinggi tingkat pendidikannya. Sebaliknya, Indonesia sekalipun memiliki banyak tambang minyak, tetapi sulit mengatasi masalah bahan bakar minyak, karena tingkat pendidikannya rendah, yang mengakibatkan lemah di bidang teknologi explorasi tambang minyak.

Pendidikan yang menghidupkan adalah pendidikan yang dapat mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh umat manusia. Selama pendidikan tidak diarahkan untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi manusia, pendidikan itu tidak banyak gunanya.²²

Mengenai pendidikan, apa tujuan dari pendidikan itu? Menurut ahli pendidikan Herbert Spencer yang dikutip oleh Nasution beliau mengemukakan tujuan pendidikan sebagai berikut:

1. *Self Preservation* : manusia harus dapat menjaga kelangsungan hidupnya dengan hidup sehat, mencegah penyakit, hidup teratur dan sebagainya.
2. *Securing The Necessities Of Life* : ia harus sanggup mencari nafkahnya dan memenuhi kebutuhan hidupnya dengan melakukan suatu pekerjaan.
3. *Rearng A Family* : ia harus menjadi ibu atau bapak yang sanggup bertanggung jawab atas pendidikan anaknya dan kesejahteraan keluarganya.
4. *Maintaining Proper Sosial And Political Relationship* : setiap manusia adalah makhluk sosial yang hidup dalam lingkungan masyarakat dan negara. Oleh karena itu harus pandai bergaul, rela bekerjasama dengan orang lain dan memenuhi kewajibannya sebagai warga negara.
5. *Enjoying Leisure Time* : ia harus juga sanggup memanfaatkan waktu senggangnya dengan memilih kegiatan-kegiatan dan kegairahan hidup.²³

Dalam masalah ekonomi misalnya, ekonomi baru adalah ekonomi yang berdasarkan ilmu pengetahuan. Hal ini berarti kehidupan ekonomi akan tergantung pada kualitas sumber daya manusia yang menguasai dan mampu mengimplementasikan nilai-nilai ilmu pengetahuan di dalam kehidupan dan organisasi serta produk dari investasi tersebut. Perkembangan ekonomi yang tidak mengembangkan kualitas sumber daya manusia, dan tidak memiliki organisasi yang efektif dan efisien, tidak akan dapat menghasilkan produk-produk yang kompetitif. Demikian pula produk-produk yang dihasilkan tanpa inovasi dan pengembangan terus-menerus serta tidak mendapatkan input dari konsumen yang inteligen, tidak dapat menghasilkan produk yang bermutu dan

²² Lihat lebih jelas, baca Sutrisno, Pendidikan Islam ..., h. 51-52.

²³ Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, (Bandung: Jemmars, 1982), h. 34.

mempunyai daya saing tinggi. Di sinilah letaknya peranan pendidikan yang dapat memberikan sumbangan dalam terwujudnya kegiatan ekonomi yang produktif dan mempunyai daya saing tinggi berkat penguasaan ilmu pengetahuan dari para pelakunya.

Apabila suatu masyarakat dan bangsa yang hanya dapat bertindak secara tradisional di dalam kehidupan ekonominya, mereka tidak dapat bersaing di dalam kehidupan global. Pendidikan dalam abad 21 mempunyai tanggung jawab moral untuk menunjang perkembangan ekonomi yang berdasarkan ilmu pengetahuan agar supaya dapat membantu masyarakat membangun suatu kehidupan yang lebih adil dan lebih makmur serta kompetitif.

Seorang pakar ekonomi, Lester C. Thurow, mengemukakan bahwa salah satu unsur penting dalam membangun kemakmuran ialah menciptakan ilmu pengetahuan (*creating knowledge*) dan mengembangkan keterampilan (*skills*) yang pada hakikatnya tidak lain ialah menemukan ilmu pengetahuan baru. Ilmu pengetahuan tanpa penerapannya tidak akan bermanfaat bukan saja bagi pengembangan ilmu pengetahuan itu sendiri tetapi juga bagi peningkatan taraf hidup manusia.²⁴

Dalam masalah budi pekerti, berbagai pihak, seperti Kemendikbud dan Badan Pertimbangan Pendidikan Nasional (BPPN) membahas masalah pendidikan budi pekerti ini, kemudian menerbitkan semacam pedoman bagi pendidikan budi pekerti. Sebagai kesimpulan dan rekomendasi penting dari wacana tersebut adalah sebagai berikut:

1. Pendidikan budi pekerti bukan hanya tanggung jawab sekolah, tetapi juga tanggung jawab keluarga dan lingkungan sosial yang lebih luas. Jadi meskipun sekolah misalnya menyelenggarakan pendidikan budi pekerti, tetapi lingkungan masyarakatnya tidak atau kurang baik, maka pendidikan budi pekerti di sekolah tidak banyak artinya.
2. Pendidikan budi pekerti sesungguhnya telah terkandung dalam pendidikan agama dan mata pelajaran lain. Akan tetapi, kandungan budi pekerti tersebut tidak bisa teraktualisasikan karena adanya kelemahan mata pelajaran agama dalam segi metode maupun muatan yang lebih menekankan pengisian aspek kognitif daripada aspek afektif (budi pekerti). Meskipun BPPN dan Kemendikbud telah memperbincangkan dan merumuskan persoalan ini sejak tahun 1995, namun harus diakui belum tercapai kesepakatan tuntas tentang pendidikan budi pekerti.²⁵

Selanjutnya, hasil perumusan Depdiknas (2000) dan Depag (2000) menyimpulkan bahwa pendidikan budi pekerti bukan menjadi mata pelajaran tersendiri (monolitik), tetapi merupakan program pendidikan terpadu yang memerlukan perilaku, keteladanan, pembiasaan, bimbingan dan penciptaan

²⁴ Lihat H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan ...*, h. 50-51.

²⁵ Lihat lebih lanjut, Nurul Zuriah, *Pendidikan Moral & Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan: Menggagas Platfom Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstual dan Futuristik*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2008), h. 117-118.

lingkungan yang kondusif. Dengan demikian, pendidikan budi pekerti diintegrasikan ke dalam semua mata pelajaran dan program pendidikan, seperti pendidikan agama dan PPKN. Seperti dapat terlihat, rincian nilai-nilai budi pekerti yang diberikan Depdiknas dan Depag pada intinya merupakan nilai-nilai keagamaan dan akhlak, yang secara sosial dan kultural dipandang dan diakui sebagai nilai-nilai luhur bangsa.²⁶

Selanjutnya, pendidikan yang memenuhi kebutuhan daerah adalah pendidikan yang meningkatkan mutu kualitas manusia Indonesia. Dalam hal ini, H.A.R. Tilaar mengatakan bahwa misi pendidikan nasional ialah menciptakan suatu sistem dan iklim pendidikan nasional yang demokratis dan bermutu, dalam rangka mengembangkan kualitas manusia Indonesia.²⁷

Kegiatan pendidikan dapat terjadi di berbagai lingkungan: keluarga, sekolah, tempat bekerja, tempat olahraga, tempat rekreasi, dalam kendaraan umum, dan sebagainya. Jadi upaya pendidikan formal dan non-formal dapat dilakukan di berbagai jenis lingkungan. Begitu pula halnya dengan peristiwa pendidikan informal, ia dapat terjadi di berbagai lingkungan pula.

Pada dasarnya semua lingkungan pendidikan dapat dibagi menjadi tiga jenis, yaitu (1) lingkungan pendidikan keluarga; (2) lingkungan pendidikan sekolah; (3) lingkungan pendidikan luar-sekolah. *Pendidikan formal* terutama terjadi di lingkungan keluarga dan lingkungan sekolah, tetapi dapat pula terjadi di lingkungan luar-sekolah. *Pendidikan non-formal* terutama dilakukan di lingkungan luar-sekolah (di masyarakat), tetapi dapat juga dilaksanakan di lingkungan keluarga. *Pendidikan informal* dapat terjadi di mana-mana.²⁸

Secara lebih khusus lagi, peranan pendidikan (edukasi) dalam mengadakan perubahan (transformasi) masyarakat, tampak sebagai berikut:

1. Menjaga generasi sejak masa kecil dari berbagai penyelewengan ala jahiliyyah. Mengembangkan pola hidup, perasaan dan pemikiran mereka sesuai dengan fitrah, agar mereka memiliki fondasi yang kokoh di masyarakat.
2. Karena pendidikan berjalan seiring dengan perkembangan anak-anak, maka pendidikan akan sangat mempengaruhi jiwa dan perkembangan anak serta akan menjadi bagian dari kepribadiannya untuk kehidupannya kelak kemudian hari.
3. Pendidikan sebagai alat terpenting untuk menjaga diri dan memelihara nilai-nilai positif. Pendidikan mengemban dua tugas utama yang saling kontradiktif, yaitu melestarikan dan mengadakan perubahan.²⁹

Selain itu, beberapa pengaruh yang dapat dimainkan oleh pendidikan terhadap perkembangan masyarakat di lingkungannya adalah mencerdaskan

²⁶ Ibid., h. 118.

²⁷ H.A.R. Tilaar, *Membenahi Pendidikan ...*, h. 67.

²⁸ Mochtar Buchori, *Ilmu Pendidikan & Praktek Pendidikan dalam Renungan*, (Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1994), h. 14.

²⁹ Nurul Zuriah, *Pendidikan Moral ...*, h. 7.

kehidupan masyarakat, membawa bibit pembaharuan bagi perkembangan masyarakat, menciptakan warga masyarakat yang siap dan terbekali bagi kepentingan kerja di lingkungan masyarakat, serta memunculkan sikap-sikap positif dan konstruktif bagi masyarakat sehingga tercipta integrasi sosial yang harmonis di tengah-tengah masyarakat.³⁰

Lebih lanjut dalam penjelasan Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2003 dikemukakan bahwa manusia membutuhkan pendidikan dalam kehidupannya. Pendidikan merupakan usaha agar manusia dapat mengembangkan potensi dirinya melalui proses pembelajaran dan/atau cara lain yang dikenal dan diakui oleh masyarakat. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31 ayat (1) menyebutkan bahwa setiap warga negara berhak mendapatkan pendidikan dan ayat (3) menegaskan bahwa pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang merupakan salah satu tujuan negara Indonesia.³¹

Sudah jelas di sini bahwa pendidikan itu sangat urgen sekali. Bahwa urgensi pendidikan adalah sebagai solusi memecahkan problem sosial kemasyarakatan. Karena pendidikan nasional di Indonesia ini memiliki visi dan misi pendidikan. Pendidikan nasional mempunyai visi terwujudnya sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman yang selalu berubah. Dengan visi pendidikan tersebut, pendidikan nasional mempunyai misi sebagai berikut:

1. Mengupayakan perluasan dan pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan yang bermutu bagi seluruh rakyat Indonesia.
2. Membantu dan memfasilitasi pengembangan potensi anak bangsa secara utuh sejak usia dini sampai akhir hayat dalam rangka mewujudkan masyarakat belajar.
3. Meningkatkan kesiapan masukan dan kualitas proses pendidikan untuk mengoptimalkan pembentukan kepribadian yang bermoral.
4. Meningkatkan keprofesionalan dan akuntabilitas lembaga pendidikan sebagai pusat pembudayaan ilmu pengetahuan, keterampilan, pengalaman, sikap dan nilai berdasarkan standar nasional dan global.
5. Memberdayakan peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pendidikan berdasarkan prinsip otonomi dalam konteks Negara Kesatuan Republik Indonesia.

³⁰ Lihat lebih lanjut, Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999), h. 104-109.

³¹ Nurul Zuriah, *Pendidikan Moral ...*, h. 7.

Berdasarkan visi dan misi pendidikan nasional di atas, pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.³²

Bangsa yang cerdas bukan hanya merupakan bangsa yang dapat bekerja tetapi juga bangsa yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan, bangsa yang kreatif atau yang berjiwa *entrepeneur* sehingga kekayaan alam dan kekayaan kebudayaan Indonesia dapat sebesar-besarnya dimanfaatkan untuk masyarakat dan bangsa Indonesia sendiri. Pendidikan nasional bukan semata-mata ditujukan pada persaingan³³ di dalam kehidupan dunia modern yang terbuka tetapi pertama-tama diarahkan kepada pemecahan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia sekarang dan dewasa ini yaitu penuntasan kemiskinan dan peningkatan kecerdasan rakyat banyak. Tujuan yang mulia ini hanya dapat diwujudkan oleh seseorang yang cakap tetapi juga yang bermoral dan takwa terhadap Sang Pencipta. Pendidikan nasional bukan semata-mata untuk perkembangan intelektual atau pekerja yang terampil tetapi seorang yang cerdas dan bermoral serta kreatif.

Pesan selanjutnya yang terkandung dalam UUD 1945 ialah pendidikan nasional ditujukan untuk seluruh rakyat dan bukan hanya untuk sebagian kecil dari masyarakat. Dengan sendirinya sistem pendidikan nasional yang hanya mengalokasikan kepada segelintir rakyat Indonesia bukan hanya bertentangan dengan UUD 1945, tetapi juga pengingkaran terhadap hak asasi manusia.³⁴

Penutup

Dari uraian di atas, dapat disarikan bahwa dalam membangun pendidikan yang mencerahkan, perlu ada bangunan filosofis pendidikan yang didasarkan pada problem-problem sosial kemasyarakatan. Permasalahan-permasalahan sosial seperti kemiskinan, pengangguran, kemerosotan moral, korupsi, kekerasan sosial, dan lain sebagainya muncul karena salah satu faktornya adalah tidak berfungsinya pendidikan atau lembaga-lembaga pendidikan yang ada di Indonesia dalam memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut. Pendidikan karakter yang sekarang ini dikembangkan harus dibarengi dengan semangat filosofi pendidikan progresivisme dan rekonstruktivisme. Kedua aliran filsafat ini, di negara Barat, memang didesain untuk menciptakan kemajuan dan integritas sosial. Kurikulum pendidikan secara sadar diarahkan untuk memperbaiki ketimpangan dan problematika kehidupan bermasyarakat, baik

³² Lihat *ibid.*, h. 8-9.

³³ Lihat juga Agus Nuryatno, *Mazhab Pendidikan Kritis*, (Yogyakarta: Resist Book, 2011, h. 70.

³⁴ Lihat, H.A.R. Tilaar, *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2009), h. 6-7.

dalam hubungan antara masyarakat dengan lingkungan alam maupun hubungan antar masyarakat dalam kehidupan politik, ekonomi, dan sosial-budaya. Jika konsep pendidikan di Indonesia tidak dibangun dan diarahkan untuk perbaikan kehidupan sosial, yaitu dengan turut andil dalam menyelesaikan problem-problem sosial kekinian secara luas maka pendidikan yang ada sekarang ini hanya akan melahirkan lulusan yang tidak peduli dengan berbagai permasalahan sosial yang dihadapi masyarakat, bangsa dan negara. Terlebih lagi, kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, dan informasi di era globalisasi seperti sekarang ini selain memberikan keuntungan dan kemudahan dalam urusan dunia juga berdampak negatif terhadap perilaku masyarakat baik secara individu maupun kelompok, dan itu semua harus bisa diantisipasi dan diatasi oleh pendidikan.

Daftar Pustaka

- Brubacher, *Modern Philosophies of Education*, McGraw-Hill, 1950.
- Buchori, Mochtar, *Ilmu Pendidikan & Praktek Pendidikan dalam Renungan*, Yogyakarta: PT Tiara Wacana Yogya, 1994.
- Dewey, John, *My Pedagogic Creed*, New York: Progressive Education Association, 1929.
- , *Democracy and Education*, New York: Macmillan, 1928.
- Dwiyanto, Djoko, dan Ign. Gatut Saksono, *Pendidikan Karakter Berbasis Pancasila (Negara Pancasila: Agama atau Sekuler; sosialis atau Kapitalis)*, Yogyakarta: Ampera Utama, 2012.
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1999.
- M. Chan, Sam, dan T. Sam Tuti, *Analisis SWOT Kebijakan Pendidikan Era Otonomi Daerah*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2005.
- Nasution, *Asas-Asas Kurikulum*, Bandung: Jemmars, 1982.
- Nuryatno, Agus, *Mazhab Pendidikan Kritis*, Yogyakarta: Resist Book, 2011.
- S. Sadiman, Arif, dkk, *Media Pendidikan: Pengertian, Pengembangan dan Pemanfaatannya*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996.
- Sutrisno, *Pendidikan Islam yang Menghidupkan : Studi Kritis Terhadap Pemikiran Pendidikan Fazlur Rahman*, Yogyakarta: Kota Kembang, 2006.
- Suyadi, *Strategi Pembelajaran Pendidikan Karakter*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013.
- Syaefudin Sa'ud, Udin, dan Abin Syamsudidin Makmun, *Perencanaan Pendidikan: Suatu Pendekatan Komprehensif*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2005.
- Tilaar, H.A.R., *Kekuasaan dan Pendidikan: Manajemen Pendidikan Nasional dalam Pusaran Kekuasaan*, Jakarta: Rineka Cipta, 2009.
- , *Membenahi Pendidikan Nasional*, Jakarta, Rineka Cipta, Cet. 2, 2009.
- , *Perubahan Sosial dan Pendidikan: Pengantar Pedagogik Transformatif untuk Indonesia*, Jakarta: Rineka Cipta, 2012.
- Taba, Hilda, *Curriculum Development: Theory and Practice*, New York: Harcourt, Brace & World, Inc., 1962.
- Tim Sosiologi, *Sosiologi 1: Suatu Kajian Kehidupan Masyarakat*, Jakarta: Yudhistira, cet. 2, 2007.
- Yusuf, Munawir, dkk, *Pendidikan Bagi Anak dengan Problema Belajar*, (Solo: Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2003.

Zuriah, Nurul, *Pendidikan Moral & Budi Pekerti Dalam Perspektif Perubahan: Menggagas Platfom Pendidikan Budi Pekerti Secara Kontekstual dan Futuristik*, Jakarta: Bumi Aksara, 2008.

Harian *Kompas*, 10 Februari 2003, "Tajuk Rencana".

Indopos, 8 Juni 2015

Jawa Pos, 21 Oktober 2009